

Evaluasi Dampak Program Keluarga Berencana (KB) Terhadap Kemiskinan Di Indonesia

Kurniawan^a

^aSekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bulungan Tarakan, Indonesia,
mahakaryakurniawanamir@gmail.com

INFO ARTIKEL

Keywords:

*Family plan programs,
Poverty*

Kata Kunci:

*Program keluarga berencana,
Kemiskinan*

ABSTRACT

Poverty alleviation is the first goal of the Sustainable Development Goals (SDGs). The family planning program is one option to reduce poverty. The success of the family planning program needs to be explained to provide the information needed to support the family planning program. Research that focuses on explaining the influence of family planning programs on poverty alleviation in Indonesia is limited. Old-inary least squares (OLS) data analysis techniques are used to analyze the effect of family planning programs on poverty in Indonesia. Aggregate data covering 34 provinces in Indonesia in 2010-2021 was selected. The results of the analysis confirm that family planning programs have a negative effect on poverty in Indonesia. There is strong evidence that encourages the government to evaluate family planning programs as a priority for government investment in alleviating poverty in Indonesia.

ABSTRACT

Pengentasan kemiskinan merupakan tujuan pertama dari Sustainable Development Goals (SDGs). Program keluarga berencana (KB) adalah salah satu pilihan untuk mengurangi angka kemiskinan. Keberhasilan program KB perlu dijelaskan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung program KB. Penelitian yang berfokus untuk menjelaskan pengaruh program KB terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia terbatas. Teknik analisis data oldinary least square (OLS) digunakan untuk menganalisis pengaruh program keluarga berencana terhadap kemiskinan di Indonesia. Data agregat yang mencakup 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2010-2021 dipilih. Hasil analisis mengonfirmasi program keluarga berencana berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia. Ada bukti kuat yang mendorong pemerintah untuk mengevaluasi program

KB menjadi prioritas investasi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.

PENDAHULUAN

Pengentasan kemiskinan merupakan tujuan pertama dari *Sustainable Development Goals* (SDGs). Program-program terbaik dan berorientasi pada hasil wajib dihasilkan oleh pemerintah dan mendorong peran yang lebih swasta untuk membantu masyarakat miskin keluar dari lingkaran setan kemiskinan. Indonesia membutuhkan lebih banyak tindakan dari para pelaku pembangunan untuk mencapai target pengentasan kemiskinan. Tanpa ada satu pun penduduk miskin yang terlewatkan oleh program pengentasan kemiskinan, sebuah tantangan yang menarik.

Table 1
Penduduk Miskin Di Indonesia September 2021

| Pulau | Penduduk miskin (%) | | | Jumlah penduduk miskin (ribu orang) | | |
|------------------------|---------------------|----------|-------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| | Perkotaan | Pedesaan | Total | Perkotaan | Pedesaan | Total |
| Sumatera | 8,38 | 10,86 | 9,75 | 2.247,43 | 3.615,23 | 5.862,66 |
| Jawa | 7,75 | 12,04 | 9,16 | 7.973,69 | 6.049,83 | 14.023,52 |
| Bali dan Nusa Tenggara | 8,91 | 17,75 | 13,59 | 645,85 | 1.447,19 | 2.093,04 |
| Kalimantan | 4,57 | 7,06 | 5,85 | 372,42 | 602,99 | 975,41 |
| Sulawesi | 5,78 | 13,03 | 10,04 | 475,9 | 1.531,18 | 2.007,09 |
| Maluku dan Papua | 5,54 | 28,25 | 20,43 | 144,05 | 1.397,88 | 1.541,93 |
| Indonesia | 7,6 | 12,53 | 9,71 | 11.859,34 | 14.644,30 | 26.503,65 |

Sumber: BPS, 2022a

Data pada Tabel 1 menjelaskan jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia pada bulan September 2021. Persentase penduduk miskin di perdesaan (12,53 persen) lebih besar dibandingkan dengan penduduk miskin di perkotaan (7,6 persen). Persentase penduduk miskin terbesar berada di perdesaan Maluku dan Papua (28,25 persen) dan berbeda jauh dengan perkotaan (5,54 persen). Kondisi menarik menjelaskan bahwa persentase penduduk miskin di pedesaan di Bali dan Nusa Tenggara cukup tinggi (17,75 persen). Kondisi menarik lainnya adalah jumlah penduduk miskin terbesar berada di daerah perkotaan pulau Jawa (7.973,69 ribu jiwa). Jumlah penduduk miskin terendah terdapat di pulau Kalimantan (975,41 ribu jiwa). Kondisi yang perlu mendapat perhatian adalah jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 26,5 juta jiwa atau 9,71 persen.

Program keluarga berencana (KB) merupakan salah satu pilihan yang telah

dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengurangi angka kemiskinan. Program tersebut mendorong masyarakat miskin dan rentan miskin untuk mengontrol jumlah anak guna menciptakan keluarga yang berkualitas. Rumah tangga miskin yang memiliki banyak anggota keluarga berisiko tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak. Kesempatan memperoleh pendidikan dan kesehatan yang terbaik menjadi lebih sulit bagi masyarakat miskin dengan banyak anggota rumah tangga. Keberhasilan program perlu dijelaskan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan.

Table 2
Persentase Perempuan Berusia 15-49 Tahun Dan Sudah Menikah Di Indonesia (Persen)

| No | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Indonesia | 61.86 | 61.98 | 61.75 | 59.98 | 59.39 | 58.70 | 58.73 | 55.96 | 56.04 | 55.06 |

Sumber: BPS, 2022b

Data pada Tabel 2 menjelaskan persentase wanita berumur 15-49 tahun dan berstatus kawin yang sedang menggunakan/memakai alat KB di Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2012 (61,86 persen) dan tahun 2021 (55,36 persen). Kondisi tersebut berbahaya ketika rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin tidak dapat di kontrol dalam mengikuti program keluarga berencana (KB).

Teori *the Malthusian population trap* menjelaskan populasi akan berhenti karena sumber daya yang menopang kehidupan tidak cukup untuk mendukung populasi manusia (Todaro & Smith, 2015). Pertumbuhan penduduk meningkatkan kebutuhan akan tanah, air dan energi. Kondisi tersebut menyebabkan masalah lingkungan, kelangkaan, dan kerawanan pangan. Karakteristik rumah tangga rentan adalah rumah tangga miskin yang memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak. Kondisi ini menambah parahnya kemiskinan ketika anak tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena tidak memiliki dana (Banerjee & Duflo, 2011; Meo et al., 2018; Nabi et al., 2020; Haughton & Khandker, 2009).

Investasi dalam program keluarga berencana memberikan pengembalian seumur hidup. Meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana (KB) dan mengurangi unmet need KB meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi dan memperluas kesempatan pendidikan dan pekerjaan yang maksimal baik bagi perempuan maupun laki-laki (Williams, 2014; Bailey et al., 2014; Goli et al., 2021; Boudet et al., 2018). Peran desa KB berkontribusi dalam kesejahteraan keluarga di daerah pedesaan. Pendapatan perempuan, aset, indeks massa tubuh, dan sekolah anak-anak meningkat secara substansial di daerah dengan akses yang lebih baik ke layanan keluarga berencana (Canning & Schultz, 2012; Rochaida et al., 2020).

Jumlah kelahiran dan ukuran rumah tangga berpengaruh positif terhadap kemiskinan ketika ibu masih muda, tetapi menjadi negatif ketika ibu bertambah tua. Beban ketergantungan yang lebih tinggi karena jumlah anak yang lebih muda (Libois et al., 2018; Bayudan-Dacuyucuy & Lim, 2013; Adepoju & Akinluyi, 2017). Manfaat akses universal keluarga berencana dan pengembalian investasi tidak hanya berdampak pada kehidupan kelompok rentan tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi di negara berpenghasilan rendah dan menengah (Hellwig & Barros, 2023). Tantangan yang lebih besar di hadapi ketika kebutuhan untuk mengikuti program KB tidak terpenuhi dalam rumah tangga miskin, tingkat pendidikan rendah, dan tinggal di pedesaan. Cakupan program KB meningkat seiring dengan penurunan kemiskinan dan ketidaksetaraan gender (Gayatri & Fajarningtiyas, 2023, Ahinkorah et al., 2020, Asif et al., 2019; Starbird et al., 2016, Miller & Babiarz, 2016).

Penelitian komprehensif yang fokus menjelaskan dampak program KB terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia masih minim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh program keluarga berencana (KB) terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. Selanjutnya, kembangkan model yang menjelaskan kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk mencapai tujuan penelitian. Pendekatan kualitatif dilakukan untuk menjelaskan pengaruh program KB terhadap kemiskinan di Indonesia. Analisis deskriptif bertujuan untuk menelaah data penduduk miskin dan program KB. Penelitian ini menggunakan data agregat yang mencakup 34 provinsi di Indonesia. Data agregat untuk provinsi Kalimantan Utara tersedia dari tahun 2015 karena merupakan provinsi baru.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari panel data survei sosial ekonomi (susenas) nasional dari badan pusat statistik (BPS). Rentang waktu data yang dipilih adalah 2010-2021 berdasarkan ketersediaan data. Penelitian ini berfokus menganalisis pengaruh program KB terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Tabel 3 Variabel penelitian

| No | Variabel | Deskripsi |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Kemiskinan | Persentase penduduk miskin di ukur menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan |
| 2 | Program keluarga berencana | Persentase wanita usia subur 15-49 tahun (WUS) atau persentase wanita usia subur 15-49 tahun yang sedang kawin (Pasangan Usia Subur/PUS) yang tidak ingin mempunyai anak lagi (membatasi) atau ingin menunda memiliki anak dan menggunakan metode kontrasepsi modern. Komponen dalam menghitung indikator ini adalah prevalensi penggunaan kontrasepsi (metode modern) dan kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi. |

Sumber: BPS, 2022

Teknik analisis data yang dipilih adalah regresi *ordinary least squares* (OLS). Berdasarkan Wooldridge (2019) *fixed effect model* dipilih karena tepat untuk menganalisis data agregat level provinsi atau kabupaten/kota. Analisis data dilakukan dengan menggunakan aplikasi Eviews 12. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, model regresi OLS yang dibangun dalam penelitian ini dijelaskan pada persamaan berikut.

Keterangan.

Poverty_{it} : Kemiskinan

Familyplanit : Program keluarga berencana

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis data *ordinary least squares* (OLS) untuk menjelaskan pengaruh program KB terhadap kemiskinan di Indonesia diperoleh bukti sebagai berikut.

Tabel 4
Hasil ordinary least squares (OLS)

| Variable | Coefficient | Std.Error | t-Statistic | Prob. |
|------------|-------------|-----------|-------------|--------|
| Familyplan | -0.249372 | 0.050760 | -4.912753 | 0.0000 |

Sumber: Hasil analisis Eviews 12

Bukti menarik diperoleh dari hasil analisis data pada Tabel 4 yang menjelaskan bahwa variabel program KB berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia. Hasil analisis data tersebut konsisten dengan penelitian sebelumnya. Ketika persentase wanita berumur 15-49 tahun dan berstatus kawin yang sedang menggunakan/memakai alat KB di Indonesia program keluarga berencana meningkat 1 persen akan kemiskinan berkurang 0,24 persen di Indonesia.

Penurunan persentase wanita usia 15-49 tahun dan berstatus kawin yang menggunakan/menggunakan alat KB di Indonesia perlu menjadi perhatian pemerintah. Di sisi lain, penurunan tersebut tidak dapat diprediksi karena semakin banyaknya masyarakat berpenghasilan tinggi yang memilih untuk tidak mengontrol jumlah anak.

Provinsi dengan persentase perempuan usia 15-49 tahun dan berstatus kawin yang menggunakan/menggunakan alat KB lebih rendah memiliki tantangan pengentasan kemiskinan yang lebih berat. Bukti menarik ini menjelaskan bahwa investasi pemerintah dalam program keluarga berencana berpengaruh negatif pada pengurangan kemiskinan di Indonesia. Bukti menarik ini membantu menjelaskan cara rumah tangga miskin keluar dari lingkaran setan kemiskinan dengan mengendalikan jumlah anak. Keluarga berencana merupakan poin penting dalam intervensi pengentasan kemiskinan.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Rumah tangga miskin dan renta miskin wajib dilibatkan dalam program keluarga berencana untuk mengendalikan jumlah kelahiran anak. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari kerentanan dan tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga miskin. Hasil penelitian tersebut kemudian menjadi bukti kuat untuk mendorong pemerintah mengevaluasi program KB menjadi prioritas investasi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Data program KB menggunakan data persentase wanita usia 15-49 tahun dan berstatus kawin yang

sedang menggunakan/menggunakan alat KB yang tersedia di tingkat provinsi. Ketersediaan data agregat di tingkat kabupaten/kota lebih menjelaskan pengaruh program KB terhadap kemiskinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adepoju, A.O.& Akinluyi, O.I. (2017). "Multidimensional poverty status of rural households in Nigeria: Does family planning have any effect?", *International Journal of Social Economics*, Vol. 44 No. 8, pp. 1046-1061. <https://doi.org/10.1108/IJSE-10-20150282>
- Ahinkorah, B.O., Ameyaw, E.K. & Seidu, A. A. (2020). Socio-economic and demographic predictors of unmet need for contraception among young women in sub-Saharan Africa: evidence from cross-sectional surveys. *Reprod Health* 17, 163. <https://doi.org/10.1186/s12978-020-01018-2>
- Asif, M.F & Pervaiz, Z. (2019). Socio-demographic determinants of unmet need for family planning among married women in Pakistan. *BMC Public Health* 19, 1226. <https://doi.org/10.1186/s12889-019-7487-5>
- Bailey, M. J., Malkova, O., & Norling, J. (2014). Do Family Planning Programs Decrease Poverty? Evidence From Public Census Data. *CESifo Economic Studies*, Volume 60, Issue 2, Pages 312–337. <https://doi.org/10.1093/cesifo/ifu011>
- Banerjee, A., & Duflo, E. (2011). *Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty*. PublicAffairs.
- Bayudan-Dacuyucuy, C & Lim, J. A. (2013). Family size, household shocks and chronic and transient poverty in the Philippines. *Journal of Asian Economics*, Volume 29, Pages 101-112, <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2013.10.001>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil kemiskinan di Indonesia September 2022*. Republik Indonesia. Jakarta
- _____. (2023b). *Persentase wanita berumur 15-49 tahun dan berstatus kawin yang sedang menggunakan_memakai alat KB*. Republik Indonesia. Jakarta
- Boudet, M. M. A., Buitrago, P A., Briere, L. D. L. B., Newhouse, L. D., Matulevich, R. C. E., Scott, K., & Suarez-Becerra, P. (2018). Gender Differences in Poverty and Household Composition Through the Life-Cycle : A Global Perspective. *World Bank Policy Research Working Paper*. No. 8360.
- Canning, D & Schultz, T. P. (2012). The economic consequences of reproductive health and family planning. *Family Planning* 4. [http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(12\)60827-7](http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60827-7)
- Gayatri, M & Fajarningtiyas, D. N. (2023). Unmet Need for Contraception Among Young Women: Evidence From Indonesia. *Journal of Population and Social Studies (JPSS)* 2 Volume 31. pp.170–185. <http://doi.org/10.25133/JPSSv312023.010>

- Goli, S., James K. S., Singh, D., Srinivasan, V., Mishra, R., Rana, Md, J., & Reddy, U. S. (2021). Economic returns of family planning and fertility decline in India, 1991–2061. *Journal of Demographic Economics*, 1–33. doi:10.1017/dem.2021.3
- Haughton, J., & Khandker, R. S. (2009). *Handbook on poverty and inequality*. The World Bank. Washington.
- Hellwig F and Barros AJ. (2023). *Learning from success cases: ecological analysis of potential pathways to universal access to family planning care in low- and middle-income countries*. Gates Open Research. <https://doi.org/10.12688/gatesopenres.13570.3>
- Libois, F & Somville, V. (2018). Fertility, household size and poverty in Nepal. *World Development*, Volume 103, 311-322.
- Meo, S.M., Khan, J. V., Ibrahim, O.T., Khan, S., Ali, S., & Noor, K. (2018). Asymmetric impact of inflation and unemployment on poverty in Pakistan: new evidence from asymmetric ARDL cointegration. *Asia Pacific Journal of Social Work and Development*.
- Miller, G & Babiarz, K. S. (2016). Family Planning Program Effects: A Review of Evidence from Microdata. *CGD Working Paper 422*.
- Nabi, A.A., Shahid, Z.A., Mubashir, K.A. Ali, A., Iqbal, A. & Zaman, K. (2020). Relationship between population growth, price level, poverty incidence, and carbon emissions in a panel of 98 countries. *Environmental Science and Pollution Research*. 27, 31778– 31792.
- Rochaida, E., Lestari, D., & Suharto, R. B. (2020). Knowledge Village Family Planning (KB) Economy Growth Increase in Samarinda, Indonesia. *Palarch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17 (6).
- Starbird. E., Norton, M., & Marcus, R. (2016). Investing in family planning: key to achieving the sustainable development goals. *Glob Health Sci Pract*. 4(2):191–210. <http://dx.doi.org/10.9745/GHSP-D-15-00374>
- Todaro, P. M., & Smith, C. S. (2015). *Economics Development*. Twelfth Edition. Pearson
- Williams, R. (2014). Storming the Citadels of Poverty: Family Planning under the Emergency in India, 1975–1977. *The Journal of Asian Studies*, 73(2), 471-492. doi:10.1017/S0021911813002350
- Wooldridge, M. J. (2019). *Introductory Econometrics*. Seventh Edition. Cengage Learning. Boston.